

**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN BALAPULANG**
Jl. Raya Selatan No.129 Balapulang - 52464

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BALAPULANG

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Balapulang Tahun 2019 dan capaian Renstra Kecamatan Balapulang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

- 3.1. Tujuan Renja SKPD
- 3.2. Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1. Rencana Kerja
- 4.2. Pendanaan

BAB V. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Balapulang menyusun Renja Kecamatan Balapulang Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan oendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balapulang. Renja Kecamatan Balapulang Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Balapulang Tahun 2019-2024 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Balapulang Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,

Persiapan penyusunan renja meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan akhir,

Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

c. Penyusunan rancangan,

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah selaras dengan rancangan akhir RKPD.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

e. Perumusan rancangan akhir, dan

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan tentang RKPD.

f. Penetapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan renja Kecamatan Balapulang Tahun 2022 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Balapulang yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Pada penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta

prakiraan maju yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

- b. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan akhir renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan rancangan akhir renja perangkat daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan akhir RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan renja perangkat daerah disampaikan kepada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan renja perangkat daerah sudah selaras dengan rancangan akhir RKPD. Rancangan renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan baahn penyempurnaan rancangan akhir RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Balapulang Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
17. Rencana Strategis Kecamatan Balapulang Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Balapulang Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana kerja Kecamatan Balapulang jangka pendek 1 (satu) tahun untuk Tahun 2022;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Balapulang dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas Kecamatan Balapulang dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Balapulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Kecamatan Balapulang;
6. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Kerja Kantor Kecamatan Balapulang Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BALAPULANG

- 2.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Balapulang Tahun 2020 dan capaian Renstra Kecamatan Balapulang
- 2.6. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.7. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.8. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

- 3.3. Tujuan Renja SKPD
- 3.4. Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.3. Rencana Kerja
- 4.4. Pendanaan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BALAPULANG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Balapulang Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Balapulang

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Balapulang, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam tahun anggaran 2020 Kecamatan Balapulang telah melaksanakan 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Balapulang Tahun 2020.

Dari 2 program dan 11 kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 91,42%. Adapun penyerapan anggaran tiap-tiap program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Realisasi Belanja Daerah Program dan Kegiatan Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, dan Keuangan			
a.	Penyediaan Jasa Kantor	139.395.000	123.508.435	88,60
b.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	46.440.000	43.970.000	94,68
No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
c.	Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja	11.068.000	9.530.000	86,10
d.	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	18.000.000	18.000.000	100,00
e.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	155.664.000	153.369.000	98,53
2	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Balapulang			
a.	Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan	26.565.000	25.939.000	97,65
b.	Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17.020.000	10.375.000	60,96
c.	Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	49.729.000	42.903.100	86,27
d.	Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	39.445.000	32.533.200	82,48
e.	Peningkatan Layanan Umum	0	0	0
JUMLAH				91,42

Rincian realisasi APBD Tahun 2020 perkegiatan pada Kecamatan Balapulang:

Program Manajaemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, dan Keuangan				
1	Penyediaan Jasa Kantor			
a.	Input	:	Tersedianya jumlah dana Rp. 209.395.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)	
b.	Output	:	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja materai - Jasa komunikasi/ sumber daya air dan listrik - Penyediaan alat tulis kantor - Barang cetakan - Penggandaan fotocopy - Komponen instalasi listrik/ penerangan 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan rumah tangga - Bahan bacaan koran radar dan suara merdeka - Petugas kebersihan dan jaga malam
	c.	Outcome	:	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesekretariatan
	d.	Target	:	250 lbr; 325 lbr; 12 bln; 8 jenis; 15 m; 53.000 lbr; 4 jenis; 7 jenis; 12 bln; 12bln
	e.	Realisasi Fisik	:	80,60%
	f.	Realisasi Keuangan	:	88,60% Rp. 123.508.435,00
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			
	a.	Input	:	Tersedianya jumlah dana Rp. 46.440.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
	b.	Output	:	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemeliharaan rumah dinas - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional mobil dan sepeda motor - Penyusunan DED - Pemeliharaan rutin/berkala alat perlengkapan kantor, laptop, unit komputer, AC, pengeras suara dan printer
	c.	Outcome	:	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kantor
	d.	Target	:	1 tahun; 1 tahun; 1 unit; 11 unit; 1 paket; 5 jenis
	e.	Realisasi Fisik	:	94,68%
	f.	Realisasi Keuangan	:	Rp. 43.970.000,00
3	Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja			
	a.	Input	:	Tersedianya jumlah dana Rp.11.068.000,00
	b.	Output	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Renja - Dokumen Renstra - Dokumen RKA/DPA - Dokumen SPIP - Dokumen LAKIP - Dokumen SAKIP. LPPD dan IKU
	c.	Outcome	:	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemenuhan layanan kesekretariatan - Terlaksananya kegiatan perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja
	d.	Target	:	5 buku
	e.	Realisasi Fisik	:	86,10%
	f.	Realisasi Keuangan	:	86,10% Rp. 9.530.000 (<i>refocussing</i>)
4	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah			
	a.	Input	:	Tersedianya jumlah dana Rp. 18.000.000,00 (lima belas juta empat puluh ribu rupiah)
	b.	Output	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD
	c.	Outcome	:	Terbayarnya honor pengelola keuangan SKPD
	d.	Target	:	12 bulan
	e.	Realisasi Fisik	:	100%

	f.	Realisasi Keuangan	:	100% Rp. 18.000.000,00
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor			
	a.	Input	:	Tersedianya jumlah dana Rp. 155.664.000,00
	b.	Output	:	- Terwujudnya pager keliling, pavingisasi, dan pengaspalan jalan - Pengadaan laptop
	c.	Outcome	:	Terlaksananya kegiatan pengadaan di kantor kecamatan
	d.	Target	:	1 paket; 4 unit
	e.	Realisasi Fisik	:	100%
	f.	Realisasi Keuangan	:	98.53% Rp. 153.36.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Balapulang				
6	Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan			
	a.	Input	:	Tersedianya jumlah dana Rp. 26.565.000,00
	b.	Output	:	- Terlaksananya peningkatan PAD (PBB) - Operasional forum komunikasi kecamatan - Jumlah papan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) - Peningkatan kapasitas ASN dan aparatur desa - Pelatihan aparatur pemerintah desa - Profil desa dan public
	c.	Outcome	:	Terlaksananya kegiatan tata pemerintahan
	d.	Target	:	6 Kegiatan
	e.	Realisasi Fisik	:	97,65%
	f.	Realisasi Keuangan	:	97,65% Rp. 153.369.000,00
7	Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	a.	Input	:	Tersedianya jumlah dana Rp. 17.020.000,00 (nol rupiah) atau <i>refocussing</i>
	b.	Output	:	- Jumlah monev Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) - Keamanan wilayah/ poskamling - Upacara dan pawai Hari Ulang Tahun RI - Pelatihan FKDT
	c.	Outcome	:	Terlaksananya kegiatan peningkatan layanan ketentraman dan ketertiban umum
	d.	Target	:	4 kegiatan
	e.	Realisasi Fisik	:	60,96%
	f.	Realisasi Keuangan	:	60,96% Rp. 10.375.500,00 (<i>refocussing</i>)
8	Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	a.	Input	:	Tersedianya jumlah dana Rp. 49.729.000,00
	b.	Output	:	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana desa (ADD) - Musrenbang RKPD - Kecamatan lomba desa - Pelatihan sikudes - Pameran investasi - Jumlah kegiatan tilik desa - Bina desa mandiri

	c.	Outcome	:	- Meningkatnya persentase desa yang menyusun APBDes - Terpenuhi data profil desa dan kecamatan - Terlaksananya kegiatan layanan PMD
	d.	Target	:	7 kegiatan
	e.	Realisasi Fisik	:	86,27%
	f.	Realisasi Keuangan	:	86,27% Rp. 42.903.100,00
9	Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat			
	a.	Input	:	Tersedianya jumlah dana Rp. 39.445.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
	b.	Output	:	- Pemutahiran data miskin - PKK - Penyelenggaraan MTQ - BUMDes - Pembinaan kepemudaan dan karang taruna - Hari jadi Kabupaten Tegal - Seni daerah/ gamelan - FORKAB - PORSADIN
	c.	Outcome	:	- Terlaksananya fasilitas perekonomian dan kesejahteraan rakyat - Terlaksananya kegiatan layanan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
	d.	Target	:	9 kegiatan
	e.	Realisasi Fisik	:	82,48%
	f.	Realisasi Keuangan	:	82,48% Rp. 32.533.200,00
11	Peningkatan Layanan Umum			
	a.	Input	:	Tersedianya jumlah dana Rp. 0 (nol rupiah) atau <i>refocussing</i>
	b.	Output	:	Jumlah monitoring dan evaluasi lingkungan hidup dan sarana prasaran
	c.	Outcome	:	Terlaksananya kegiatan layanan umum
	d.	Target	:	1 kegiatan
	e.	Realisasi Fisik	:	0%
	f.	Realisasi Keuangan	:	0% Rp. 0 (<i>refocussing</i>)

Evaluasi hasil Renja Kecamatan Balapulang dan pencapaian Renstra Kecamatan Balapulang sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kecamatan Balapulang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balapulang

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	100					100	683.837.632	41,34

7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu						100	6.516.250	33,99
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rentra, Renja, RKA, DPA, SPIP, PK, IKU, Rencana Aksi			11.068.000	9.530.000	86,1		6.516.250	46,66
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, LPPD, LKPI, LAKIP								
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu						100	758.403.761	67,40
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN							746.403.761	67,42
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan			18.000.000	18.000.000	100		12.000.000	66,67
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan administrasi umum perangkat daerah						100	23.398.500	40,95

7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan bermotor roda 2 7 buah kendaraan								
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC, Jumlah PC, Jumlah Laptop, Jumlah Printer (sesuai kebutuhan)								
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor			155.664.000	153.369.000	98,53			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah						100	47.935.275	71,02
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat							500.000	33,33
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air							11.945.275	39,82
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpeliharanya kebersihan kantor			209.965.000	123.508.435	88,6		35.490.000	98,58
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah BMD dalam kondisi baik						100	25.517.000	40,83

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas (mobil) terpelihara, jumlah kendaraan dinas (motor) terpelihara							21.340.000	66,69
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya terpelihara							2.610.500	20,08
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara			46.440.000	43.970.000	94,68		1.566.500	8,95
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	81,79					80,54	17.013.500	49,13
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan						100	13.053.500	66,26
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, survey IKM terlaksanakan							13.053.500	66,26

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksanakan						100	3.960.000	26,52
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah desa lunas PBB jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur							3.960.000	26,52
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang	10					100	16.690.000	53,90
		Persentase desa maju Kecamatan Balapulang	30							
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa			49.729.000	42.903.100		100	16.690.000	53,90
							86,27			
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang							16.690.000	100,00

7.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan								
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Hari Jadi,KEPEMUDAAN, MTQ,Pelatihan Gamelan,PKK,Rakor Kemiskinan,Rakor Pemberdayaan Masyarakat								
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	100					100	14.017.250	84,07
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			17.020.000	10.375.500	60,96	100	14.017.250	84,07
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19							14.017.250	84,07

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	100					100	52.460.750	68,65
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum						100	52.460.750	68,65
7.01.05.2.01.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	jumlah kegiatan Hari Jadi & HUT RI							36.860.750	70,08
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan							15.600.000	65,50
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	100					100		

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi						100		
7.01.06.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa								
7.01.06.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Rakor mitigasi bencana; Pembinaan Siskamling; Kadarkum; Rakor FKDM								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Balapulang dilakukan terhadap penilaian capaian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kecamatan Balapulang. Kantor Kecamatan Balapulang sebagai SKPD tidak banyak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa pelayanan telah ditangani oleh Dinas/Badan di tingkat Kabupaten yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pelayanan. Pada Kantor Kecamatan Balapulang hanya merekomendasikan beberapa pelayanan guna diteruskan kepada Dinas/Badan yang berwenang. Beberapa pelayanan yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Balapulang diantaranya:

1. Surat Pengantar SKCK

Untuk pelayanan SKCK, Kantor Kecamatan Balapulang hanya memberikan persetujuan pengantar guna diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam hal ini yaitu Polsek Balapulang. Selama kurun waktu tahun 2019 telah tercapai jumlah pengantar SKCK yang telah kami setujui sebanyak 1.556 pemohon.

2. Surat Pengantar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pelayanan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi wewenang dari Dinas Pelayanan Terpadu (DPT) Kabupaten Tegal, namun untuk proses pembuatannya memerlukan verifikasi dari pihak kecamatan. Selama kurun waktu tahun 2019 hanya terealisasi pengantar pembuatan surat IMB sebanyak 1 (satu) buah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pembuatan Surat ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

3. Surat Keterangan Pindah

Masalah kepengurusan surat keterangan pindah menjadi wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, namun dalam prosesnya tetap memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan. Dalam kurun waktu tahun 2019 telah teralisasi surat pengantar keterangan pindah sebanyak 620 pengantar.

4. Surat Keterangan Tidak Mampu

Masalah kepengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal, namun dalam prosesnya tetap memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan. Dalam kurun waktu tahun 2019 telah terealisasi surat pengantar keterangan pindah sebanyak 30 lembar pengantar.

5. Pelayanan Legalisasi Umum

Pelayanan legalisasi umum diantaranya meliputi perijinan proposal, surat keterangan domisili, surat keterangan satu nama, surat keterangan ahli waris, surat pernyataan beda tanggal lahir. Dalam kurun waktu tahun 2019 untuk perijinan proposal terealisasi sebanyak 54 proposal. Surat keterangan domisili, surat keterangan ahli waris, dan surat pernyataan beda tanggal lahir selama kurun waktu tahun 2019 terdapat 243 lembar.

6. Surat Permohonan Ijin Hajatan

Akhir tahun 2020 wabah virus Covid-19 dari China mulai merambah ke Indonesia. Tingginya tingkat penyebaran Covid-19 ini membuat pemerintah melarang adanya kegiatan yang mengundang banyak kerumunan. Salah satunya yaitu penyelenggaraan hajatan. Maka untuk tahun 2020 semua warga Kecamatan Balapulang yang akan mengadakan acara hajatan diwajibkan mengajukan permohonan ijin hajatan Kepada Kantor Camat Balapulang. Selama kurun waktu tahun 2020 permohonan ijin menyelenggarakan hajatan telah masuk sebanyak 261 pemohon.

Gambaran kinerja pelayanan kantor Kecamatan Balapulang satu tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) fokus pada layanan wajib pelayanan dasar untuk meningkatkan pelayanan Kecamatan Balapulang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel T-C.30 berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD		Target Renstra					Realisasi Capaian pada Tahun					Persentase realisasi anggaran pada Tahun						
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	20	14	15	16	17		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	1	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		2	IKM	70	70	70	75	75	72	72	75	75	79,29	91,25	92,50	93,75	93,75	91,42	
		3	Dokumen perencanaan pembangunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4	Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90	95	95	95	95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		5	Persentase penduduk ber :																
		-KTP	90	90	90	90	95	80	80	80	85	90	90	95	95	95	95	95	
		-Kartu Keluarga	90	90	90	90	95	80	80	80	85	90	90	95	95	95	95	95	

6	Jumlah promosi senibudayalokal di tingkatKabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Jumlah BPD yang menginisiasi Peraturan Desa	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Jumlah PKK Desa yang aktif melaksanakan 10 Program Pokok PKK	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Jumlah desa yang mengisi data profil desa	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Peringkat Desa Kecamatan Balapulang dalam lomba desa Tk. Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Jumlah organisasi pemuda di bina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Rasio Poskamling dengan jumlah desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		13	Rasio Linmas terlatih dengan jumlah linmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		14	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi Aktif	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		15	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		16	Rata-rata Persentase pengguna hak pilih Pilkades	75	75	75	80	80	70	70	75	80	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		17	Rata-rata Persentase pengguna hak pilih pemilu legislatif	75	75	75	80	80	70	70	75	80	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		18	Rata-rata Persentase pengguna hak pilih pemilu Presiden	75	75	75	80	80	70	70	75	80	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		19	Rata-rata Persentase	75	75	75	80	80	70	70	75	80	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			pengguna hak pilih pemilu Gubernur																
		20	Rata-rata Persentase pengguna hak pilih pemilu Bupati	75	75	75	80	80	70	70	75	80	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berkaitan dengan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Camat Balapulang. Permasalahan – permasalahan dimaksud meliputi:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pelaksanaan program kegiatan yang sering kali memerlukan sarana dan prasarana, oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana yang cukup. Sehubungan dengan masih terbatasnya sarana prasarana kantor, maka tidak sedikit menghambat pelaksanaan program kegiatan di Kantor Kecamatan Balapulang, sehingga waktu pelaksanaan dan tujuan sasaran program kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.
2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Balapulang kurang memadai. Oleh karena itu diperlukan penambahan personil yang mempunyai kemampuan yang cukup. Dengan adanya keterbatasan SDM, maka dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Balapulang.
3. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kapasitas dan sumber daya pemerintah desa yang minim sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemerintah desa.
4. Masih banyak desa yang melakukan penyusunan APBDes dan RKPDes belum sesuai ketentuan karena kurang optimalnya SDM aparatur desa dalam menyusun perencanaan keuangan desa (ketidaktepatan waktu mengakibatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa terhambat).
5. Mempertahankan capaian indikator SARA tetap nol. Kondusivitas SARA di Kabupaten tegal telah terbina baik, dengan kerjasama lintas sector antara tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda.
6. Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat oleh Kecamatan belum optimal. Hal ini karena tupoksi Kasi kesra yang cukup luas sementara keterbatasan sumber daya Kecamatan.
7. Persentase fasilitasi sarana prasarana dan lingkungan hidup belum optimal. Hal ini karena tupoksi Kasi Pelayanan Umum yang cukup banyak dan kompleks sementara keterbatasan sumber daya kecamatan.

8. Belum optimalnya penggunaan sarana Teknologi dan Informasi dalam penyusunan data kemiskinan oleh desa, sehingga desa tidak dapat mengakses, merubah dan memvalidasi sesuai perkembangan data kemiskinan di desa masing-masing melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation).

Sebagai formula menghadapi permasalahan yang berkembang dimaksud sebagaimana dijelaskan diatas, maka diperlukan rekomendasi untuk dilaksanakan secara kongkret dengan maksud mengurangi dan memecahkan permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antar SKPD, baik secara horizontal maupun vertical. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga mewujudkan persepsi yang sama terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Keadaan inilah yang akan mempermudah tercapainya tujuan dan sasaran yang tepat.
2. Penambahan personil Kecamatan Balapulang dan dilaksanakannya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SDM baik secara formal dan non formal, guna meningkatkan kemampuan SDM Kecamatan Balapulang segera dilaksanakan. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan program kegiatan guna mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang tepat
3. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan sarana prasarana kantor untuk segera dilaksanakan, agar dalam pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan dari permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana kantor.
4. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SDM baik secara formal dan non formal, guna meningkatkan kemampuan SDM Kantor Camat Balapulang segera dilaksanakan. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan program kegiatan guna mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang tepat.
5. Koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat akan kebutuhan atas kenyamanan dan keamanan perlu ditingkatkan. Dengan kerjasama dengan aparat terkait dimungkinkan minimalisasi gangguan-gangguan keamanan, sehingga wilayah Kantor Camat Balapulang dalam keadaan kondusif. Dengan situasi kondusif, maka dimungkinkan program kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tentu saja hal ini berdampak baik pada usaha pencapaian visi misi Kabupaten Tegal.
6. Pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga dapat memberikan peran dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2020 diakhiri dengan penyusunan Rancangan Akhir RKPD yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan. Penyusunan Rancangan RKPD mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Tegal. Review terhadap rancangan akhir RKPD dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut:

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022
Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Lokasi
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	81.79	38.780.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	81.79	38.780.000	Kecamatan Balapulang
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	Persen; Tahunan		38.780.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	Persen; Tahunan		38.780.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, survey IKM terlaksanakan	Kegiatan; desa	1;20	18.780.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, survey IKM terlaksanakan	Kegiatan; desa	1;20	18.780.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	Kegiatan; desa	1;20	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	Kegiatan; desa	1;20	20.000.000	

Kode	Rancangan Akhirl RKPd					Hasil Analisa Kebutuhan					Lokasi
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	5%	122.677.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	5%	122.677.000	Kecamatan Balapulang
		Persentase desa maju Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	10%			Persentase desa maju Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	10%		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	Persen; Tahunan		95.677.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	Persen; Tahunan		95.677.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang	kegiatan	1	22.288.000	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang	kegiatan	1	22.288.000	
	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan	kegiatan	1	21.339.000	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan	kegiatan	1	21.339.000	

	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Jadi KEPEMUDAAN MTQ Pelatihan Gamelan PKK Rakor Kemiskinan Rakor Pemberdayaan Masyarakat	Persen; Tahunan	100	73.050.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari Jadi KEPEMUDAAN MTQ Pelatihan Gamelan PKK Rakor Kemiskinan Rakor Pemberdayaan Masyarakat	Persen; Tahunan	100	73.050.000	Kecamatan Balapulang
--	--	---	--------------------	-----	------------	--	---	--------------------	-----	------------	-------------------------

Kode	Rancangan Akhirl RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Lokasi
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	100	2.500.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	100	2.500.000	Kecamatan Balapulang
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah desa yang difasilitasi sosialisasi peraturan daerah			2.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi sosialisasi peraturan daerah			2.500.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan daerah	kegiatan	1	2.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan daerah	kegiatan	1	2.500.000	

Kode	Rancangan Akhirl RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Lokasi
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	100	40.580.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	100	40.580.000	Kecamatan Balapulang
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persen; Tahunan	100	40.580.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persen; Tahunan	100	40.580.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah kegiatan Hari Jadi & HUT RI	kegiatan	6	15.580.000	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah kegiatan Hari Jadi & HUT RI	kegiatan	6	15.580.000	

Kode	Rancangan Akhirl RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Lokasi
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	bulan	12	25.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	bulan	12	25.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	70	42.363.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	70	42.363.000	Kecamatan Balapulang
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	Persen; Tahunan		42.363.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	Persen; Tahunan		42.363.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan; desa	1; 20	22.220.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan; desa	1; 20	22.220.000	
	Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kegiatan; desa	1; 20	20.143.000	Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kegiatan; desa	1; 20	20.143.000	

Kode	Rancangan Akhirl RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Lokasi
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	Persen; Tahunan	100	1.211.322.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	Persen; Tahunan	100	1.211.322.000	Kecamatan Balapulang
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	Buku	5	12.960.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	Buku	5	12.960.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rentra, Renja, RKA, DPA, SPIP, PK, IKU, Rencana Aksi	Buku	5	7.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rentra, Renja, RKA, DPA, SPIP, PK, IKU, Rencana Aksi	buku	5	7.000.000	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, LAKIP	Buku	5	5.960.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, LAKIP	buku	5	5.960.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu	Buku	5	952.012.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu	buku	5	952.012.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	933.972.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	tahun	1	933.972.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan	Bulan	12	18.040.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan	bulan	12	18.040.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen; Tahunan	100	55.575.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen; Tahunan	100	55.575.000	

Kode	Rancangan Akhirl RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Lokasi
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan bangunan kantor	paket	1	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan bangunan kantor	paket	1	5.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	paket	1	9.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	paket	1	9.500.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia	paket	1	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia	paket	1	5.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	bulan	12	24.375.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	bulan	12	24.375.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan	paket	1	4.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan	paket	1	4.200.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	bulan	12	2.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	bulan	12	2.500.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	bulan	12	8.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	bulan	12	8.000.000	

Kode	Rancangan Akhirl RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Lokasi
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	Persen; Tahunan	100	15.775.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	Persen; Tahunan	100	15.775.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC, Jumlah PC, Jumlah Laptop, Jumlah Printer (sesuai kebutuhan)	unit	2	15.775.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC, Jumlah PC, Jumlah Laptop, Jumlah Printer (sesuai kebutuhan)	unit	2	15.775.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persen; Tahunan	100	85.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persen; Tahunan	100	85.500.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat	lembar	320	1.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat	lembar	320	1.500.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	bulan	12	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	bulan	12	30.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	bulan	12	54.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	bulan	12	54.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah BMD dalam kondisi baik	Persen; Tahunan	100	69.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah BMD dalam kondisi baik	Persen; Tahunan	100	69.500.000	

Kode	Rancangan Akhirl RKPd					Hasil Analisa Kebutuhan					Lokasi
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan	jumlah kendaraan dinas (mobil) terpelihara, jumlah kendaraan dinas (motor) terpelihara	unit	9	37.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan	jumlah kendaraan dinas (mobil) terpelihara, jumlah kendaraan dinas (motor) terpelihara	unit	9	37.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainya terpelihara	paket	1	15.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainya terpelihara	paket	1	15.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	paket	1	17.500.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	paket	1	17.500.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja disusun melalui tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan. Musrenbang dilaksanakan guna menyerap aspirasi dari masyarakat, yang selanjutnya melalui Musrenbang tingkat Kecamatan akan ditetapkan daftar skala prioritas sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagaimana Tabel T.C.32 berikut:

Tabel T.C.32

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Balapulang

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Lokasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	81.79	Kecamatan Balapulang
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan			
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, survey IKM terlaksanakan	Kegiatan; desa	1;20	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah desa lunas PBB jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur	Kegiatan; desa	1; 20	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	5	Kecamatan Balapulang
	Persentase desa maju Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	10	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Lokasi
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang	kegiatan	1	
Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan	kegiatan	1	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor Kemiskinan desa, jumlah jenis keg festival budaya, jumlah rakor anak/paud, keg MTQ, Jumlah rakor pemuda, keg fasi, keg Yaumi, keg Posyandu, Keg pesta siaga, keg PKBM, Rakor PKK, jumlah pameran pembangunan dilaksanakan	kegiatan	1	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	100	Kecamatan Balapulang
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19	kegiatan	1	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Lokasi
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi Pengakan Perda dan Jumlah sosialisasi perda	kegiatan	1	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	100	Kecamatan Balapulang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum			
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah kegiatan Hari Jadi & HUT RI	kegiatan	6	
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan FKDM	kegiatan	1	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	bulan	12	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	70	Kecamatan Balapulang
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Lokasi
Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan; desa	1; 20	
Sub Kegiatan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kegiatan; desa	1; 20	
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina	kegiatan	1	
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	kegiatan	1	
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan	kegiatan	1	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	Persen; Tahunan	100	Kecamatan Balapulang
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu			
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rentra, Renja, RKA, DPA, SPIP, PK, IKU, Rencana Aksi	buku	5	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, LAKIP	buku	5	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu			
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	tahun	1	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan	bulan	12	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Lokasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	memenuhi administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan bangunan kantor	Paket	1	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia	Paket	1	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	Bulan	12	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Pengandaan	jumlah jenis barang cetakan	Paket	1	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	Bulan	12	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	Bulan	12	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)			
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC, Jumlah PC, Jumlah Laptop, Jumlah Printer (sesuai kebutuhan)	Unit	4	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat	lembar	320	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	bulan	12	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	bulan	12	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Lokasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah BMD dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas (mobil) terpelihara, jumlah kendaraan dinas (motor) terpelihara	unit	9	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya terpelihara	paket	1	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	paket	1	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah. Mengacu pada arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah, maka arah kebijakan perencanaan program dan kegiatan pada kantor Camat Balapulang diseleraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balapulang Tahun 2019-2024.

3.2. Tujuan Sasaran Renja PB

Tujuan Renja Kantor Camat Balapulang Tahun 2022 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balapulang 2019-2024 kedalam rencana program dan kegiatan tahunan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022.
- c. Menciptakan kepastian dan strategis perencanaan program dan kegiatan diantara Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat Balapulang.
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh Bapeda dan Litbang Kabupaten Tegal kedalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

3.3. Pengarusutamaan dalam pembangunan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan atau *mainstreaming* terhadap isu-isu strategis yaitu:

- a. PUG ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathaway, gender budget statement* sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional renstra dan renja.
- b. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting)

maupun penanggulangan sanitasi gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja.

- c. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.
- d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
- e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

3.4. Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 berpedoman pada RKPD dan Renstra Kecamatan Balapulang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balapulang, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan dimaksud adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Uppaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2022 dan prakiraan tahun 2022 sebagaimana Tabel T-C.33 berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023

KECAMATAN BALAPULANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Asal Usulan
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
KECAMATAN BALAPULANG				1.414.702.000						1.680.000.000	
NON URUSAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	Kecamatan Balapulang	100%	1.194.802.000						1.440.000.000	Usulan OPD
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu			12.960.000			DAU			20.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rentra, Renja, RKA, DPA, SPIP, PK, IKU, Rencana Aksi		5 Buku	7,000,000						10,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, LAKIP		5 Buku	5,960,000						10,000,000	

<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu			952,012,000			DAU			1.140,000,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN		1 tahun	933.972.000						1.100.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan keuangan		12 bulan	18.040.000						40,000,000	
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	pemenuhan administrasi umum perangkat daerah			58,575,000			DAU			68,500,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis penerangan bangunan kantor		1 paket	5.000.000						6.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		1 paket	9.500.000						10.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga tersedia		1 paket	5.000.000						7.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan		12 bulan	24.375.000						26.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan		1 paket	4.200.000						5.000.000	

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan		12 bulan	2.500.000						2.500.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi		12 bulan	8.000.000						12.000.000	
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)			15.775.000			DAU			20.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC, Jumlah PC, Jumlah Laptop, Jumlah Printer (sesuai kebutuhan)		4 unit	15.775.000			DAU			20.000.000	
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah			85.500.000						141.500.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat		320 lembar	1.500.000			DAU			1.500.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air		12 bulan	30.000.000						30.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpeliharanya kebersihan kantor		12 bulan	54.000.000						110.000.000	
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	jumlah BMD dalam kondisi baik			69.500.000						50.00.000	

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas (mobil) terpelihara, jumlah kendaraan dinas (motor) terpelihara		20 unit	37.000.000						30.000,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya terpelihara		1 tahun	15.000.000			DAU			10.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara		1 tahun	17.500.000						10.000.000	
UNSUR PEMERINTAHAN KECAMATAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	Kecamatan Balapulang	81.79%	38.780.000						40.000.000	
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan			38.780.000						20.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, survey IKM terlaksanakan		1 keg; 20 desa	20.000.000			DAU			20.000.000	

<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan			18.780.000						20.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah desa lunas PBB jumlah pengajuan layanan paten terlayani sesuai prosedur		1 keg; 20 desa	18.780.000						20.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang	Kecamatan Balapulang	10%	95.677.000						95.000.000	
	Persentase desa maju Kecamatan Balapulang		10%				DAU				
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Ketersediaan data perkembangan desa			95.677.000						95.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang		1 keg	22.288.000						20.000.000	
Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Monev		1 keg	21.339.000						20.000.000	

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah rakor pemberdayaan masyarakat, jumlah pelatihan, jumlah Rakor Kemiskinan desa		1 keg	52.050.000						55.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	Kecamatan Balapulang	100%	2.500.000						5.000.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan dan Sosialisasi Peraturan Daerah			2.500.000						5.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah		1 keg	2.500.000						5.000.000	

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Kecamatan Balapulang	100%	46.580.000						45.000.000	
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum</i>			46.580.000						45.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah kegiatan Hari Jadi & HUT RI		2 keg	15.580.000						20.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		12 bulan	25.000.000						25.000.000	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	Kecamatan Balapulang	70%	47.080.000						55,000,000	
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Jumlah desa tertib administrasi			42.363.000						55,000,000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa		2 keg; 20 desa	22.220.000						20.000.000	
Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		2 keg; 20 desa	20.143.000						25.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa		1 keg; 20 desa	15.000.000						15.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Balapulang Tahun 2022 mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan disesuaikan dengan jumlah dana/ anggaran yang sudah ditetapkan pagu indikatifnya oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 berjumlah 6 (enam) program, terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.464.222.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.194.802.000,00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.960.000,00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.960.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	952.012.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	933.972.000,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	18.040.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.575.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.500.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.375.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.775.000,00

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.775.000,00
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.500.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	30.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.500.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.500.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.780.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.780.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	18.780.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.677.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95.677.000,00
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.288.000,00
Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21.339.000,00
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.050.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.500.000,00
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.500.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.500.000,00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.580.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.580.000,00
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.580.000,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42.363.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.363.000,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.220.000,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.143.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Balapulang Tahun 2022 merupakan Renja yang penyusunannya dilandasi oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balapulang Tahun 2019-2024, memuat tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Balapulang.

Renja ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Balapulang.

Akhirnya dukungan dari Pemerintah Daerah melalui alokasi dana yang memadai akan sangat membantu terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tegal melalui keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Balapulang, Januari 2021

CAMAT BALAPULANG



NIP. 196704191995031002